

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM PELAYANAN ADMINDUK BERBASIS DIGITAL

(Studi Pada Desa Sumber Lele, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)

Andhi Nur Rahmadi, Supriyanto, Mareta Syamsya Q

Universitas Panca Marga Probolinggo
e-mail : maretasyamsya17@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan teknologi saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka membentuk pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pelayanan administrasi kependudukan yang masih manual menjadi salah satu persoalan pemerintah desa Sumber lele, untuk itu pemerintah setempat mencoba pembaharuan melalui sistem informasi manajemen berbasis digital untuk mempermudah pengurusan administrasi kependudukan di Desa Sumber Lele. Tulisan ini bermaksud mengkaji implementasi dari sistem informasi manajemen dalam pelayanan adminduk berbasis digital dengan memanfaatkan *website* dan aplikasi lapak sebagai sistem dalam pelayanan di Desa Sumber lele. Metode penelitian dalam riset ini menggunakan studi literatur dan pedoman wawancara Pemilihan informan dipilih secara sengaja yang dianggap paham mengenai hal yang akan dikaji, mengambil data dari sumber yang dianggap relevan sesuai dengan permasalahan dan tema yang diangkat, sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya dan menentukan ketepatan hasil penelitian. Dalam riset ini teori implementasi kebijakan Edward III dipilih sebagai bahan analisis untuk melihat hasil temuan dilapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan sistem informasi manajemen dalam pelayanan adminduk berbasis digital di Desa sumber Lele masih belum optimal dalam sistem pelayanan pada aplikasi lapak namun sudah efektif dalam hal pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat setempat untuk itu masih perlu peningkatan dan pengembangan dalam sistem informasi baik pada *website* maupun aplikasi Lapak.

Kata Kunci : Adminduk, Implementasi, Sistem Informasi Digital

ABSTRACT

The use of technology is currently being developed by the government in order to form effective and efficient public services. Population administration services that are still manual are one of the problems of the Sumber Lele village government. For this reason, the local government is trying to renew through a digital-based management information system to make it easier to manage population administration in Sumber Lele Village. This paper intends to review the implementation of management information systems in digital-based administrative services by utilizing websites and lapak applications as systems in service in Sumber Lele Village. The research method in this study used literature studies and interview guidelines. The selection of informants was deliberately selected who were considered to understand the matter to be studied, taking data from sources deemed relevant according to the issues and themes raised, so as to produce reliable data and determine the accuracy of the results. study. In this study, Edward III's policy implementation theory was chosen as material for analysis to see the findings in the field. This study shows that the implementation of management information system policies in digital-based administrative services in Sumber Lele Village is still not optimal in terms of service systems in lapak applications but has been effective in terms of services that provide convenience to the local community, for that there is still need for improvement and development in information systems. both on the website and the Stall application.

Keywords: Adminduk, Implementation, Digital Information Systems

PENDAHULUAN

Kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan publik. Dengan mengikuti Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat sehingga menuntut birokrasi pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien dan memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat. Masyarakat sebagai penerima layanan juga berpengaruh terhadap citra pemerintah, masyarakat memiliki hak untuk memberikan aspirasi dan asumsinya mengenai sebuah pelayanan publik.

Berkenaan dengan hal itu birokrasi pelayanan publik harus berinovasi untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat sudah jenuh dengan layananyang bertele-tele, terlalu lama, berbelitbelit setiap pengurusan administasi dengan rantai birokrasi yang panjang (Thariq, 2013). Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang tidak mau ambil pusing untuk mengurus segala kegiatan administrasi akhirnya lebih memilih unutk menyuruh calo sebagai solusi, karena dengan menggunakan calo

pelayanan akan cepat selesai.

Salah satu jenis pelayanan publik yang dituntut untuk ditingkatkan oleh masyarakat adalah layanan administrasi kependudukan di tingkat Desa. Sumber daya manusia yang masih begitu minim tentu membuat masyarakat enggan untuk mengurus segala kegiatan administrasi kependudukan di desa. Meskipun pada dasarnya pemerintah sudah berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih fleksibel melalui penerapan prinsip *e-government*.

E-government di bentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan, bersih, akuntabel, responsif, efektif dan efisien (Angelina, 2022). Namun disayangkan tidak semua aktor birokrasi menerapkan *e-governance* secara tepat. Penerapan *e-government* dalam pembangunan pelayanan publik teraktualisasikan dalam bentuk penggunaan sistem, informasi, layanan dan tindak lanjut dalam sebuah penggunaan internet berupa website yang berbasis database atau aplikasi (Indrajit, 2015).

E-government menunjuk pada penggunaan teknologi komunikasi dan

informasi, terutama internet, untuk memberikan pelayanan dan pengiriman informasi pemerintah. Melalui *e-government*, pemerintah akan dikelola melalui jaringan teknologi dan berbasis data untuk berbagai kepentingan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana (Tarifu, 2019).

Penggunaan teknologi dapat membantu instansi pemerintah untuk meningkatkan mengenai kualitas layanan dan memungkinkan dalam membangun kepercayaan antar elemen, seperti masyarakat, petugas, dan instansi penyedia layanan. Dalam pelayanan publik dibutuhkan sebuah sistem informasi yang lebih berinovasi dari sebelumnya, hal ini berkaitan dengan prinsip *e-governance*. Banyak kebijakan baru yang dikeluarkan namun dalam implementasinya masih sama saja dengan sebelumnya yang menimbulkan ketidak efektifan dalam sebuah pelayanan publik.

Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di

lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen merupakan hal yang harus ada dalam sebuah organisasi termasuk organisasi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Sistem informasi manajemen adalah stem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu lembaga yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan suatu masalah.

Pemanfaatan *website* dalam instansi pemerintah sebagai sistem informasi yang digunakan menyebarluaskan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh semua masyarakat, mengenai hal ini sistem informasi yang tersedia banyak difungsikan berbagai macam, contohnya sistem informasi administrasi. Sistem informasi administrasi berguna sebagai pelayanan masyarakat mengenai surat menyurat dan dibangun guna membantu untuk mengatasi mengenai sistem yang tersedia dalam bentuk manual (Rahmawati, 2020).

Salah satu penerapan sistem administrasi manajemen dengan berprinsip pada *e-governance* pada pelayanan administrasi kependudukan

adalah Desa Sumber Lele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) adalah sebuah sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan Dukcapil dapat terkoneksi daring secara nasional. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang professional dan tersedianya data dan informasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Permendagri No 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi kependudukan merupakan wewenang di bawah Kementerian Dalam Negeri. Di dalamnya mengatur tentang apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang mana pencatatan administrasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi dan

mengelola baik di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemanfaatan sistem administrasi kependudukan (SIAK) di Desa Sumber Lele adalah menciptakan sebuah aplikasi LAPAK (Layanan Cepat Administrasi Kecamatan). Aplikasi LAPAK sebenarnya sudah lama dibuat oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo, hanya saja penggunaannya masih belum menyeluruh di berbagai desa. Saat ini desa Sumber lele sudah mengimplementasikan aplikasi LAPAK dalam pengurusan administrasi kependudukan. Aplikasi LAPAK melayani pembuatan surat hingga proses tanda tangan kepala desa dan camat secara elektronik (online), sehingga akan memotong waktu tunggu bagi masyarakat, karena kepala desa atau camat dapat memproses perizinan dari manapun, termasuk ketika tidak berada di kantor desa/kecamatan. Prioritasnya tidak menyulitkan masyarakat dan tanpa menyita waktu masyarakat. Selain itu masyarakat juga dapat mengurus surat secara online tanpa perlu datang ke kantor desa atau kelurahan, terkecuali ada kriteria surat tertentu yang mengharuskan pengurus untuk datang secara langsung.

Hasil observasi penemuan sementara

dilapangan sebagai studi awal didapatkan suatu hal yang menarik, yaitu bahwa peerapan sistem administrasi kependudukan berbasis aplikasi LAPAK ini masih belum optimal sebagian masyarakat masih mengalami kendala dalam hal pengurusan administrasi secara online. Ada juga masyarakat yang tidak memiliki fasilitas dan signal yang cukup untuk dapat mengakses aplikasi tersebut. Aplikasi LAPAK juga kadang tidak dapat diakses saat akan login pada akun aplikasi. Berangkat dari hal ini riset ini dilakukan pada penerapan sistem administrasi manajemen berbasis aplikasi LAPAK menarik untuk dikaji dan diteliti dalam perspektif implementasinya. Hal ini perlu di teliti dalam implementasinya sebab sistem administrasi ini masih belum lama diterapkan di Desa Sumber lele sehingga yang perlu diteliti adalah mengetahui penerapan dari aplikasi LAPAK apakah sudah berjalan efektif atau masih belum optimal dengan berdasarkan kacamata teori Implementasi kebijakan Edward III

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam riset ini adalah metode deskriptif kualitatif yang mana pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah

dokumentasi kemudian mendeskripsikan hasil temuan dengan mengkaji teori sebagai bahan analisis dengan disesuaikan temuan di lapangan. Penelitian kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan, menguraikan tentang masalah penelitian yang meliputi implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Pelayanan Adminduk Berbasis Digital di Desa Sumber Lele. Data hasil penelitian kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif yang mencakup tahapan pengumpulan data, kondensasi data, tampilan data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Objek observasi dalam riset ini dilakukan dengan kajian literatur dan narasumber yang dianggap dianggap paham mengenai hal yang akan dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu pada objek alamiah yang merupakan antithesis dari eksperimen. Di sini, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber tertulis seperti laman jurnal ilmiah, buku, dan arsip resmi sebagai bahan referensi yang dimanfaatkan untuk memperoleh jawaban dan dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III. Melalui berbagai perspektif atau

pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran sesuai temuan dilapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

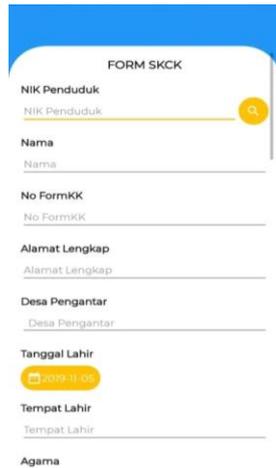
Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak terpisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini yang telah membawa tuntutan yang besar bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas ke pemerintahannya, dan juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan. Sehingga mendorong pemerintah untuk melaksanakan sebuah konsep tata pemerintahan baik yang lazim disebut dengan *good governance*. Kaitannya dalam perwujudan pelayanan publik yang *good governance*, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal (Hasri *et.al*, 2021).

Salah satu inovasi pelayanan yang bernama aplikasi LAPAK merupakan hasil kerja keras dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga. Untuk itu, diperlukan suatu terobosan yang

berbasis TI untuk memangkas waktu dan biaya yang dikeluarkan warga dalam mengurus administrasi kependudukan. Program aplikasi ini memiliki tujuan untuk mencapai pelayanan Kecamatan Dringu yang prima dengan memudahkan pelayanan, optimalisasi dan transparansi pelayanan serta mempersingkat proses pelayanan di wilayah Desa Sumber Lele.

Gambar 1. Aplikasi LAPAK dan Fitur-fiturnya





The image shows a digital form titled "FORM SKCK" with the following fields: NIK Penduduk, Nama, No FormKK, Alamat Lengkap, Desa Pengantar, Tanggal Lahir, Tempat Lahir, and Agama. Each field has a corresponding input line and a small search icon on the right side of the form.

Sumber: *Google Playstore*

Layanan Cepat Administrasi Kecamatan yang selanjutnya disingkat LAPAK adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan secara cepat dan tepat dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat secara online melalui teknologi informasi. Pelayanan ini merupakan Pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan desa yang berada di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Aplikasi Ini memproses permohonan warga terhadap surat keterangan, surat perijinan, pelayanan kependudukan dan pelayanan administrasi lain yang akan menghubungkan desa dan kecamatan yang ada di seuruh Kabupaten Probolinggo.

Potensi tentang inovasi pelayanan publik melalui program Aplikasi Lapak merupakan terobosan

baru untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat berbasis online, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan dengan cepat dan efisien. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa mengurus atau melengkapi surat-surat administratif tanpa hadir ke kantor Desa dan Kantor Kecamatan. Layanan digital ini sangat efektif.

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil temuan di lapangan mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Adminduk Berbasis Digital Di Desa Sumber Lele yang dikaji dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III. Dalam pendekatan berdasarkan Edwards III, terdapat empat variabel untuk mengetahui keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil temuan dan analisis di jabarkan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Menurut Edward, komunikasi adalah unsur paling penting yang harus dilakukan dalam implementasi kebijakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di komunikasikan kepada kelompok

sasaran, sehingga target sasaran akan paham mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Sebab kebijakan yang dijalankan apabila tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran maka akan menimbulkan sebuah distorsi implementasi.

Berdasarkan hasil temuan, dalam implementasi sistem informasi manajemen pelayanan adminduk berbasis digital di Desa Sumber Lele dengan menggunakan aplikasi LAPAK yaitu komunikasi yang dilakukan oleh perangkat desa dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi terkait penggunaan aplikasi sebagai pengurusan surat ditingkat desa dan kecamatan. Namun disayangkan pada saat adanya sosialisasi tidak semua masyarakat desa Sumber lele turut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut, sehingga masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui penggunaan aplikasi tersebut. Peneliti menilai bahwa cara komunikasi yang dilakukan oleh perangkat desa belum optimal, sebab komunikasi bisa dilaksanakan secara vertikal dan horizontal. Maksudnya adalah bukan saja melalui sosialisasi untuk komunikasi dalam penyampaian informasi mengenai implementasi

sistem informasi tersebut, tetapi juga bisa melalui media sosial yang ada serta biasa digunakan oleh desa, dengan penggunaan media sosial yang maksimal maka informasi mengenai penerapan sistem adminduk di Desa Sumber lele akan cepat tersampaikan kepada masyarakat sekitar.

b. Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor penting yang menjadi keberhasilan dalam implementasi kebijakan, tanpa sumber daya yang memadai serta minim pelaksanaan kebijakan akan mengalami keterhambatan. Sumber daya disini terbagi menjadi dua, yakni sumber daya financial dan sumber daya manusi. Sebaik apapun dirancang sebuah kebijakan apabila sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya terbatas, maka pencapaian tujuannya akan terganggu dan bisa saja implementasi sebuah kebijakan akan gagal. Begitu juga dengan implementasi dari sistem informasi manajemen pelayanan adminduk berbasis digital di Desa Sumber Lele yang juga memerlukan sumber daya yang baik dan tercukupi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan didapat bahwa dalam

implementasi pelayanan adminduk di Desa Sumber lele sumber daya yang dibutuhkan sangatlah beragam, Dari segi infrastuktur teknologi aplikasi lapak masih harus terus dikembangkan seiring dengan makin banyaknya tuntutan akan pelayanan publik bagi masyarakat lewat aplikasi sehingga dinas terkait harus terus meng*upgrade* aplikasi tersebut sehingga semakin layak digunakan bagi masyarakat.

Sumber daya anggaran dirasa cukup untuk mengimplementasikan program tersebut dana desa yang diperoleh digunakan sebagai pengelolaan fasilitas dan pengembangan sistem informasi aplikasi LAPAK. Sedangkan dari segi sumber daya manusia manusia dalam pengelolaan sistem masih kurang, sering terjadinya hambatan dalam mengakses aplikasi disebabkan karena ketidaktahuan sumber daya dari pengelola sisten tersebut sehingga menimbulkan trouble atau down pada penggunaan sistem. Dari komentar-komentar masyarakat setempat mayoritas terkait dengan kesulitan membuat akun atau login ke aplikasi tersebut padahal mereka memiliki NIK Kabupaten Probolinggo. Namun demikian tidak menyurutkan keinginan pemerintah setempat untuk memberikan layanan

terbaik dengan terus mengembangkan Aplikasi lapak tersebut.

Berdasarkan segi ketersediaan sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan karena petugas sebagai operator perlu banyak ilmu untuk mengoperasikan surat-suratnya. Sumber daya merupakan elemen yang cukup penting dalam penerapan *e-government* sehingga semakin banyak pegawai yang memahami teknologi, informasi dan Komunikasi tentunya akan semakin lebih baik.

c. Disposisi

Watak, sikap dan kemauan pelaksana sebagai aktor implementasi kebijakan. kesungguhan para pelaksana dalam bekerja. Sikap pelaksana merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan kerja serta kemauan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik garis besar bahwa tingkat pengetahuan perangkat desa dalam pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan melalui website maupun aplikasi lapak belum cukup baik dalam pengelolaan sistem informasi, namun kemauan para pengelola sistem tersebut

sangat tinggi untuk dapat mengembangkan aplikasi LAPAK.

Pelayanan yang responsif mengenai berbagai laporan atau keluhan yang dikeluarkan oleh masyarakat desa sumber lele selalu cepat ditanggapi oleh pemerintah desa. pemerintah bertanggung jawab dalam proses pelayanan publik tersebut. Melalui aplikasi Lapak masyarakat dapat dengan mudah mengurus surat administrasi yang dibutuhkan karena Operator mengirim form dan lampiran-lampiran melalui aplikasi Lapak kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan Kepala Desa jika dalam hal Kepala Desa setuju, maka ditekan tombol persetujuan, jika tidak maka dikembalikan lagi ke operator untuk dilengkapi persyaratannya. Dari sini terlihat pemberian pelayanan publik kepada masyarakat terkait kinerja pemerintah.

Selain itu, aplikasi ini juga dapat meminimalisasi praktek percaloan atau pungli bagi para pencari kerja. Aplikasi LAPAK jika kita lihat di aplikasi Play Store aplikasi lapak mendapatkan rating 4,4 dari 5 penilaian dengan berbagai komentar dari pengguna layanan, sehingga pemerintah setempat perlu mengembangkan aplikasi ini dan meningkatkan kemampuan pengelola

sistem untuk dapat menjalankan aplikasi dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada pemerintahan berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan, kebijakan dalam proses penyusunan diimplementasikan untuk mencapai sebuah tujuan dan memecahkan persoalan yang ada di masyarakat serta mempertahankan citra pemerintah. Menurut teori Edward III Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik (Samosir *et.al*, 2023).

Berdasarkan teori Edward III jika dikaitkan dengan hasil temuan peneliti mendapatkan jawaban bahwa implementasi sistem informasi manajemen berbasis *website* dan aplikasi LAPAK di Desa Sumber Lele bahwa struktur organisasi telah diatur oleh tingkat diatasnya, sesuai dengan Peraturan bupati

Kabupaten Probolinggo No 84 Tahun 2017 Tentang Layanan Cepat Administrasi yang terbentuk tim dalam setiap desa untuk bertindak megoperasikan layanan secara online dengan baik yang didasarkan pada sumber daya yang ada.

Besar tidaknya manfaat *e-government* aplikasi lapak adalah masyarakat desa sebagai penerima pelayanan untuk itu, perlu ketelitian dalam memilih aplikasi yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu didahulukan dalam pembangunan dan pengembangannya dalam sektor pelayanan publik. Jika kita melihat di *Play Store* aplikasi lapak sudah diunduh lebih dari limaratus kali. Dari sini terlihat adanya antusiasme masyarakat yang ingin menikmati pelayanan lewat aplikasi lapak tersebut, meskipun masih sering terjadi kendala dalam akses sistem tersebut. Selain itu juga perlu adanya penambahan layanan-layanan yang diberikan sehingga pelayanan yang diberikan lewat aplikasi semakin sempurna.

Penerapan aplikasi lapak pasti memiliki implikasi dan juga manfaat pada penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan. Dampak dan manfaat ini dapat dirasakan oleh pihak kecamatan itu sendiri maupun

masyarakat sekitar. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin maju maka pelayanan publik bisa dilaksanakan dengan efektif dan juga efisien dengan adanya inovasi aplikasi lapak. Bila teknologi informasi yang adadapat dimanfaatkan semaksimal mungkin maka dampak yang diberikan akan langsung terlihat, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Komputerisasi memudahkan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pembuatan dokumen kependudukan juga dapat diselesaikan bahkan dalam waktu sehari saja.

Dari segi administrasi juga menjadi lebih rapih dan mengurangi limbah kertas karena semua laporan kearsipan disimpan secara online. Dampak dan manfaat dari penerapan Aplikasi Lapak tidak hanya dirasakan oleh pemerintah Desa Sumber Lele Kecamatan Kraksaan saja, tetapi juga masyarakat sekitar. Mengingat tujuan penerapan *E-Government* berbasis aplikasi lapak ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengurus dokumen kependudukan karena dapat selesai lebih cepat. Semua persyaratan mengenai pengurusan dokumen kependudukan sudah jelas

dipaparkan sehingga tidak berbelit. Jika masih merasa kesulitan, perangkat desa atau kecamatan dengan sigap membantu mengarahkan dan menjawab pertanyaan dari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu implementasi sistem informasi manajemen dalam pelayanan adminduk berbasis digital dengan memanfaatkan website dan aplikasi lapak Pada Desa Sumber Lele, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo belum optimal berdasarkan kajian analisis teori implementasi kebijakan Edward III yang terdiri atas empat elemen, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Masih terjadi kendala kepada masyarakat yang akan mengakses untuk melakukan proses pelayanan administrasi pembuatan surat-menyurat.

Namun dari segi tingkat keefektifan dalam pelayanan sistem administrasi ini memberikan manfaat yakni aparat desa dapat mendata penduduk dengan lebih efektif dan efisien serta melakukan pencarian data dengan cepat melalui fitur pencarian yang disediakan. Diharapkan dengan adanya sistem informasi manajemen ini dapat mempercepat proses pelayanan

administrasi kependudukan dan meningkatkan efisiensi dalam pembuatan surat-menyurat.

Adapun saran yang peneliti rekomendasikan yakni Sistem administrasi informasi manajemen pada desa Sumber lele masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan dalam pengelolaan sistem melalui peningkatan sumber daya operator dengan memberikan fitur-fitur yang lebih bervariasi untuk pembaruan data yang lebih efisien dalam membuat surat mengenai administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. D. Rahmawati and A. Fatmawati, "Sistem Administrasi Desa Mendiro Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Berbasis Web," *Emitor: Jurnal Teknik Elektro*, vol. 18, no. 01, pp. 1–7, 2020.
- Angelina, R. (2022). Evaluasi Sistem Pelayanan Online Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (JSHS)*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24967/jshs.v7i1.1539>
- Hasri, M. V. A., & Sudarmilah, E. (2021). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Website Kelurahan Banaran. *MATRIK* :

- Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.30812/matrik.v20i2.1056>
- Indraljit, Rhicalrdus Eko. 2015. Electronic Government; Strategi Pembalngunaln dan Pengembalngaln Sistem Pelalyalnaln Publik Berbalsis Teknologi Digitall ,Edisi Revisi. Yogyakarta:Alndi
- Samosir, B. D., Priyatna, B., & Hananto, A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Web di Kantor Kecamatan Karawang Barat. *Jurnal Elektronik Sistem Informasi Unsika*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.35706/jesika.v1i1.2>
- Tarifu, L. (2020). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 3, 233. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12511>